



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270  
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532  
E-mail : fraksi\_ppp@dpr.go.id / fppp\_dpr\_ri@yahoo.com / set\_fppp@dpr.go.id



**PENDAPAT AKHIR MINI  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
IBU KOTA NEGARA *sdasa***

Disampaikan pada Rapat Pansus IKN, ~~Senin, 18~~ *Jan 2,* Januari 2022  
Oleh: Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI : Dr. H. Syamsurizal, SE, MM  
Anggota DPRI RI Nomor: A-462 , *Dayil - Riau. 1.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr. Wb.

*ketika dan waktu Rapat Pansus.*

*Perencanaan Pembangunan Nasional*

- Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat,
- ✓ Yang terhormat Menteri/Kepala Bappenas beserta jajaran,
- ✓ Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,
- ~~Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional beserta jajaran, / Menteri~~
- ✓ Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajaran, *menteri*
- ✓ Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
- Yang terhormat Dewan Perwakilan Daerah ~~beserta jajaran,~~
- ~~✓ Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara,~~
- ✓ Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan,  
Dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan inayah-Nya kita dapat hadir dalam rapat ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional kita yakni penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara. Tak lupa pula kita haturkan shalawat dan salam kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, hingga akhir zaman.

*Saudara pimpinan rapat yang terhormat,*

Ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu ibu kota juga mencerminkan sisi kebudayaan dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk

*Handwritten signature/initials*

memajukan negara tersebut agar pembangunan merata, masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup.

Negara dikatakan maju dan berkembang apabila pembangunan dan pengelolaannya telah tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Mengelola ibu kota memang bukan hal yang mudah, karena harus diperhitungkan dengan matang agar di kemudian hari tidak akan menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan Pemerintahan Pusat terkait pemindahan ibu kota negara dalam sebuah Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara merupakan tindak lanjut terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana pemindahan ibu kota yang akan dilakukan bertujuan melakukan pemerataan pembangunan dan pembentukan system birokrasi yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun 2020 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyumbang 59,28 persen terhadap PDB. Rencana pemindahan ibukota ini merupakan peristiwa politik yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Peristiwa politik tersebut memunculkan reaksi positif terhadap pasar modal dan pelaku ekonomi khususnya bagi investor, baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh ada beberapa negara yang telah berhasil melakukan pemindahan Ibu kota, Amerika Serikat Tahun 1800 yang memisahkan antara ibu kota pemerintahan di Washington DC dengan New York sebagai Kota Bisnis dan Ekonominya, Malaysia Tahun 1990 dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Korea Selatan yang pada tahun 2004 memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong. Contoh negara lainnya adalah Myanmar yang memindahkan ibu kotanya pada tahun 2005 dari Rangoon ke Naypyidaw. Dan Brazil yang pernah memindahkan ibukotanya dari Rio Jenairoke Brasilia pada Tahun 1960, dengan alasan ibu kota lama terlalu padat. Pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Brazil ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi ibukota lama (Rio de Janeiro) dan menimbulkan dampak positif yang signifikan bagi ibu kota baru (Brasilia). Khazakstan dari Almaty ke Astana yang berganti menjadi Nur-Sultan, India dari Kolkata ke New Dehli, dan Australia dari Melbeourne ke Canberra.

Fraksi PPP berharap keberadaan IKN baru harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, Tidak mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat dan Memastikan ketersediaan dan kecukupan pangan dalam jangka panjang. Fraksi PPP juga meminta Pemerintah agar terus melakukan sosialisasi ke masyarakat secara masif dan transparan. Sehingga kekhawatiran masyarakat terkait isu lingkungan, keberadaan masyarakat adat dan ketersediaan pangan dapat diatasi dengan baik. Selain itu, dengan filosofi Indonesia sentris, IKN diharapkan mampu

*Handwritten notes:*  
- X  
- X  
- Kita bisa - mungkin  
- yang penting  
- kpt. positif  
- dengan mem:  
- Oke!  
- PDB

*Handwritten notes:*  
- Karena waktu sudah -  
- Selanjutnya isitukan kami menyampaikan ilustrasi -  
- mena rik

*Handwritten note:*  
- Nusantara

mengatasi persoalan-persoalan kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

*Para Menteri.*

Pimpinan Sidang dan Anggota Pansus yang terhormat,

Berdasarkan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN), setelah mendengar penjelasan dari pemerintah, tanggapan dan usulan dari fraksi-fraksi di DPR, pendapat para ahli, maupun masyarakat dalam rapat Pansus maupun Panja, maka Fraksi PPP menyampaikan beberapa tanggapan, sebagai berikut: ✓

1. Fraksi PPP menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah yang telah memformulasikan rumusan-rumusan Pasal dalam RUU IKN, termasuk usulan-usulan dari PPP terkait mekanisme pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikembalikan pada Undang-Undang eksisting.
- Fraksi PPP berpendapat bahwa seluruh status tanah yang ada, baik tanah negara, tanah ulayat, tanah adat, maupun tanah pribadi harus tunduk pada ketentuan undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fraksi PPP berpandangan bahwa yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah status tanah di IKN khususnya di Kawasan Inti.
2. Terkait penyebutan Badan Otorita sebagai satuan pemerintah daerah khusus, Fraksi PPP berpandangan bahwa hal itu diperbolehkan, dan bisa diatur dalam UU yang bersifat khusus (lex specialis) yakni UU IKN. Dasar hukum yang digunakan sebagai konsideran dalam RUU ini, yakni Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur Bentuk Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau Istimewa yang kemudian diatur dalam UU tersendiri. Untuk itu, ketentuan mengenai status tersebut diatur dalam UU IKN ini. Mengacu kepada kaidah hukum, Fraksi PPP beranggapan bahwa, sepanjang tidak ada norma yang melarang maka hal itu diperbolehkan. Sedangkan dalam UUD 1945 tidak ada larangan penyebutan badan otorita. Apalagi, badan otorita yang dimaksud adalah penyebutan dari pemerintah daerah khusus IKN.
3. Jika dicermati dari penjelasan Pemerintah, penyebutan badan otorita muncul sejak draft RUU IKN diserahkan ke DPR bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres). Saat itu, penyebutannya masih pemerintah khusus dan badan otorita setingkat kementerian. Namun karena Panja memutuskan bahwa bentuk IKN adalah pemerintah daerah khusus, maka badan otorita sebagai sebutan lain dari pemerintah daerah khusus IKN diatur setingkat provinsi. Ini semua merupakan konsekuensi dari keputusan Panja yang kemudian

dirumuskan kalimatnya melalui timus. Selanjutnya, bentuk kekhususan sebagaimana dimaksud pasal 18B UUD 1945 bisa diatur melalui UU.

4. Adapun bentuk kekhususan/keistimewaan provinsi dan kabuptaen/kota di Indonesia tidak sama dan tidak harus sama. Misalnya, keistimewaan Yogyakarta diantaranya terkait suksesi kepemimpinan provinsi. Atas nama UU tidak ada pilkada provinsi, tapi gubernur diangkat langsung oleh presiden yakni sultan otomatis sebagai gubernur dan pakualam sebagai wakil gubernur. Semuanya berjalan atas nama UU. Sebaliknya di DKI Jakarta tidak ada pilkada kabupaten/kota. Atas nama UU, Gubernur DKI Jakarta mengangkat walikota dan gubernur.

5. Fraksi PPP berpandangan sifat kekhususan yang melekat pada otorita IKN mengharuskan adanya pengecualian dalam hak penggunaan tanah selama 99 tahun, baik untuk perumahan, perkantoran, industri maupun hak milik.

6. Fraksi PPP juga berpendapat bahwa hak dan kewenangan lainnya yang diberikan bagi satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi dapat diberikan kepada otorita atas keputusan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

7. Fraksi PPP juga menekankan demi tertibnya administrasi pertanahan dan adanya kepastian hukum, maka setiap bidang tanah di wilayah IKN harus diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

8. Selain itu, Fraksi PPP meminta Pemerintah untuk menjamin pemenuhan bangunan tempat tinggal bagi aparat TNI, Polri dan ASN yang ditugaskan di IKN tidak kurang dari 98 meter persegi per aparat (termasuk keluarganya).

9. Fraksi PPP, mengusulkan penambahan ayat (2) baru) pada pasal 12 : *yg berbunyi*  
 (2) ~~(baru)~~ Kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain mencakup kewenangan pemberian perijinan investasi, kemudahan berusaha, insentif fiskal dan/atau nonfiskal, serta pemberian fasilitas khusus kepada setiap orang yang mendukung pembiayaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan pengembangan IKN Nusantara dan kawasan penunjang sebagai penggerak ekonomi masa depan;

6 10. Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah agar dapat memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan IKN dan ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan kebakaran hutan yang ditimbulkan akibat pembangunan IKN.

7 11. Fraksi PPP Meminta pemerintah untuk membangun fasilitas tempat ibadah dan sarana pendidikan umum dan keagamaan *serta Fasilitas Olah Raga*

8 12. Fraksi PPP berharap dengan adanya pembangunan IKN Memberikan manfaat di Kalimantan secara keseluruhan dan termasuk daerah di Kawasan Timur Indonesia, untuk itu konektivitas antar daerah sangat diperlukan

Hadirin yang berbahagia.

*selanjutnya*  
Demikianlah Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara, Dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim** Fraksi PPP dengan ini menyetujui RUU Ibu Kota Negara untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Saudara Pimpinan Sidang, rekan-rekan Anggota Dewan, dan Hadirin sekalian, kami haturkan terimakasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah  
Wassalamualaikum Wr.Wb*

18  
Jakarta, 17 Januari 2022

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris

Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si  
Anggota DPR-RI Nomor : A-472